



MANAJEMEN DOKUMENTASI DAN LIPUTAN KEGIATAN EKSTERNAL SEBAGAI SARANA TRANSPARANSI INFORMASI DI DINAS KEBUDAYAN KOTA PALEMBANG

Esra Juliana Putri Siburian^{1*}, Merrieayu²

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Darma, Email :

esrajulianaputri@gmail.com dan merrieayu@binadarma.ac.id.com

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 3, 9/10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan
30111, Indonesia.

Abstrak. Transparansi informasi publik merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dinas Kebudayaan Kota Palembang sebagai instansi pemerintah daerah yang bergerak dalam bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan memiliki berbagai kegiatan internal maupun eksternal yang perlu dipublikasikan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen dokumentasi dan liputan kegiatan eksternal dilaksanakan oleh Bidang Media Digital dan Komunikasi Publik Dinas Kebudayaan Kota Palembang sebagai sarana transparansi informasi publik. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung selama kegiatan magang, dokumentasi, dan partisipasi dalam kegiatan peliputan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses manajemen dokumentasi dilakukan melalui tiga tahapan utama yaitu pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi. Pada tahap pra-produksi dilakukan perencanaan dan koordinasi liputan, tahap produksi berupa pelaksanaan dokumentasi kegiatan di lapangan, sedangkan tahap pasca-produksi meliputi pengolahan, pengarsipan, dan distribusi informasi melalui media digital. Pemanfaatan media sosial dan konten digital terbukti membantu instansi dalam menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, manajemen dokumentasi yang terstruktur berperan penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta meningkatkan citra positif instansi pemerintah.

Kata kunci: Manajemen Dokumentasi, Liputan Kegiatan, Transparansi Informasi Publik, Media Digital, Komunikasi Pemerintahan.

LATAR BELAKANG

Di era keterbukaan informasi saat ini, instansi pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam menjalankan setiap program kerjanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi serta agenda-agenda yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, komunikasi publik yang efektif menjadi salah satu pilar utama yang harus dikelola dengan baik oleh setiap instansi guna membangun kepercayaan (public trust) dan menyebarluaskan nilai-nilai positif dari program pemerintah kepada masyarakat luas (Hidayati 2014).

Dinas Kebudayaan Kota Palembang sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelestarian, pengembangan, dan pembinaan kebudayaan lokal memiliki intensitas kegiatan yang sangat tinggi. Kegiatan tersebut tidak hanya berlangsung di dalam lingkungan kantor (internal), tetapi juga melibatkan berbagai agenda luar kantor (eksternal) yang dinamis, seperti menghadiri rapat koordinasi antar-instansi di Pemerintah Kota, mendampingi Kepala Dinas dalam agenda protokoler, hingga meliput kegiatan kemitraan bersama komunitas atau asosiasi swasta seperti Asosiasi Pengusaha Advertising Sumatra Selatan (APASS) serta kegiatan di lapangan seperti pengelolaan museum (Husna dan Affandi 2018).

Namun, tingginya mobilitas agenda eksternal ini sering kali menghadapi tantangan dalam hal kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi ke publik. Tanpa pengelolaan yang terstruktur, dokumentasi kegiatan eksternal berisiko hanya menjadi arsip digital yang menumpuk tanpa memberikan dampak komunikatif. Di sinilah manajemen dokumentasi dan liputan memegang peranan yang sangat krusial. Proses manajemen yang dimulai dari peliputan langsung di lapangan, pencatatan poin rapat, pengolahan visual (foto dan video), hingga distribusi informasi melalui teknik broadcasting dan media sosial resmi, merupakan rantai produksi media yang menentukan kualitas transparansi informasi sebuah instansi (Nur dan Muthia 2022) Melalui kegiatan magang yang dilaksanakan di Dinas Kebudayaan Kota Palembang, penulis berkesempatan untuk terlibat langsung dalam ekosistem kerja tim Media Digital. Penulis mengamati dan mempraktikkan langsung bagaimana sebuah agenda luar kantor diliput, dikelola dokumentasinya, dan disajikan secara kreatif kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk produksi media baru seperti podcast. Pengalaman praktis ini memperlihatkan bahwa manajemen dokumentasi yang rapi bukan sekadar tugas administratif, melainkan instrumen strategis dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang menarik dan mudah dipahami.

KAJIAN TEORITIS

Komunikasi pemerintahan merupakan proses penyampaian informasi, kebijakan, dan program-program pemerintah kepada masyarakat secara sistematis dan terencana. Public relations pemerintah adalah fungsi manajemen yang membangun dan memelihara

hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah dengan publik (Cutlip, Center, & Broom, 2006). Komunikasi pemerintahan dalam era keterbukaan informasi publik berperan sebagai jembatan antara institusi negara dengan warganya demi membangun public trust (Nugraha, Novianti, Erdinaya, Komariah, & Priyatna, 2019). Fungsi utama humas pemerintahan meliputi pemberian penerangan dan pendidikan, pemberian motivasi partisipasi, serta melakukan evaluasi tanggapan masyarakat (Bowen, 2017). Keberadaan tim Media Digital sejalan dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Derivanti, 2022).

Manajemen dokumentasi adalah proses sistematis dalam merencanakan, mengorganisasikan, menyimpan, memelihara, dan mendistribusikan dokumen penting organisasi (Poddubna, 2019). Di era digital, ruang lingkungannya mencakup aset digital seperti foto, video, rekaman audio, dan konten media sosial (Molina & dos Santos, 2018). Tahapan manajemen dokumentasi terdiri atas pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi (Volkov *et al.*, 2015). Liputan kegiatan (media coverage) mengadopsi prinsip jurnalistik kehumasan untuk menyebarkan berita demi mempertahankan citra baik organisasi (Ruslan, 2014). Liputan cagar budaya dan seni memiliki nilai strategis karena berkontribusi pada pelestarian identitas lokal (Hutagalung, 2015; Lee, 2015). Dokumentasi visual seperti foto (wide shot, medium shot, close-up) dan video berperan penting menyampaikan informasi secara cepat melalui media sosial pemerintah (Ayumsari, 2022; Mauad, 2018; Salvador-Benítez & Sánchez-Vigil, 2016). Media sosial memiliki karakteristik unik untuk diseminasi informasi publik yang efektif (Varghese, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Ruang lingkup objek penelitian difokuskan pada aktivitas kerja Bidang Media Digital dan Komunikasi Publik di Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Data diperoleh secara langsung melalui partisipasi aktif dan observasi lapangan selama empat belas minggu efektif pelaksanaan program magang, terhitung dari tanggal 2 Maret hingga 5 Juni 2026. Instrumen pengumpulan data sekunder didukung oleh catatan harian logbook kegiatan, hasil jepretan aset visual lapangan, dan tinjauan dokumen legalitas operasional dinas. Analisis data dilakukan dengan

model manajemen produksi video dan dokumentasi kehumasan yang membagi tahapan kerja menjadi tiga alur utama: pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi. Evaluasi hasil dilakukan dengan menyelaraskan praktik lapangan dengan prinsip transparansi informasi sesuai amanat regulasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Kebudayaan Kota Palembang

Kegiatan pengamatan praktis dan liputan dilakukan di Dinas Kebudayaan Kota Palembang yang berlokasi di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 2, Kelurahan 19 Ilir, Palembang, tepat di kawasan Museum Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II (Iqbal, 2021). Pelaksanaan penugasan berlangsung dari tanggal 2 Maret hingga 5 Juni 2026. Selama periode ini, proses adaptasi dilakukan pada minggu pertama di bagian Sekretariat, sebelum akhirnya dipindahkan secara terfokus ke Bidang Media Digital dan Komunikasi Publik mulai minggu kedua. Penempatan ini memberikan ruang bagi penulis untuk terlibat dalam seluruh rantai produksi informasi publik instansi pemerintah daerah.

Proses Liputan Kegiatan Eksternal Melalui Manajemen Tiga Tahap

Proses liputan kegiatan luar kantor di instansi ini dijalankan melalui tiga tahapan kerja yang terstruktur dan berkesinambungan:

1. **Pra-Produksi:** Tahap ini diawali dengan penerimaan disposisi resmi dari Kepala Dinas kepada tim Media Digital yang memuat rincian waktu, lokasi, dan esensi agenda luar kantor. Dokumen ini menjadi dasar legalitas penugasan lapangan (Volkov et al., 2015). Selanjutnya, tim menyiapkan peralatan seperti kamera, lensa, mikrofon, serta melakukan riset singkat terkait materi rapat atau acara yang akan dihadiri.
2. **Produksi:** Tahap produksi melibatkan peliputan langsung di lapangan. Selama masa pengamatan, berbagai agenda eksternal berhasil didokumentasikan, antara lain pelantikan pengurus APASS di Rumah Dinas Wali Kota, rapat koordinasi kesiapan HUT Damkar dan Satpol PP di Pemkot Palembang, rapat penyelesaian hambatan Tol Trans Sumatera, hingga dokumentasi lapangan kompetisi budaya seperti Semifinal CBCA Palembang 2026 dan kegiatan "Sang Juara" di area museum.

3. **Pasca-Produksi:** Setelah proses pengambilan gambar selesai, aset visual dibawa kembali ke ruang redaksi digital untuk diseleksi dan disunting. Pada tahap ini, disusun pula teks narasi (caption) publikasi berdasarkan poin-poin rapat resmi yang telah dicatat selama acara berlangsung (Nur & Mutia, 2022).

Proses Liputan Kegiatan Eksternal Melalui Manajemen Tiga Tahap

Penyajian informasi yang menarik sangat bergantung pada teknik pengambilan aset visual (Salvador-Benítez & Sánchez-Vigil, 2016). Tim Media Digital menerapkan tiga teknik fotografi utama secara bergantian:

- **Wide Shot:** Digunakan untuk menangkap atmosfer utuh ruang pertemuan lintas instansi atau kepadatan penonton festival seni di museum.
- **Medium Shot:** Difokuskan untuk menangkap momen interaksi formal, seperti interaksi Kepala Dinas dengan perwakilan asosiasi mitra kerja swasta.
- **Close-Up:** Diarahkan untuk merekam detail ekspresi narasumber, penandatanganan berkas kerja sama, atau penyerahan plakat penghargaan (Mauad, 2018).

Seluruh foto dan video hasil edit disimpan dalam folder arsip digital berbasis tanggal dan nama kegiatan. Pola pengarsipan ini mempermudah pencarian aset kembali (data retrieval) untuk kebutuhan penyusunan laporan pertanggungjawaban kelembagaan maupun bahan materi publikasi masa depan (Poddubna, 2019).

Optimalisasi Media Sosial dan Podcast Sebagai Kanal Transparansi

Hasil olahan liputan didistribusikan secara berkala melalui media sosial resmi institusi, seperti Instagram dan kanal video digital. Media sosial ini bertindak sebagai papan pengumuman interaktif yang memotong jalur birokrasi kaku sehingga masyarakat bisa memantau kinerja kedinasan secara real-time (Varghese, 2017).

Selain media sosial konvensional, inovasi juga dilakukan melalui produksi media baru yaitu podcast kebudayaan. Proses rekaman dilakukan di studio internal dengan melibatkan tokoh budayawan, seniman, maupun perwakilan komunitas adat lokal. Format audio-visual ini memberikan ruang diskusi yang lebih mendalam mengenai sejarah Bumi Sriwijaya

tanpa terikat batasan durasi yang ketat. Langkah komunikasi digital ini secara nyata mendukung realisasi keterbukaan informasi yang edukatif bagi generasi muda (Derivanti, 2022; Nugraha et al., 2019).

Hambatan dan Strategi Solutif Lapangan

Selama pelaksanaan pengelolaan dokumentasi, ditemukan beberapa hambatan tak terduga. Salah satunya adalah adanya masa libur panjang cuti bersama nasional (Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri) pada minggu ketiga dan keempat pelaksanaan program yang sempat menghentikan arus pembaruan konten harian. Hambatan lainnya meliputi dinamika lapangan yang cepat, keterbatasan ruang gerak, serta kondisi pencahayaan yang kurang ideal di beberapa ruang rapat eksternal.

Solusi yang diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pembagian tugas (task distribution) yang ketat antaranggota tim sebelum turun ke lapangan, sehingga liputan tetap paralel dan efisien. Sementara untuk mengatasi kekosongan publikasi di masa libur, direkomendasikan penggunaan sistem manajemen penjadwalan konten (content scheduling) secara otomatis menggunakan aset digital cadangan yang telah diproduksi sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Proses pengelolaan liputan kegiatan luar kantor di Dinas Kebudayaan Kota Palembang dilaksanakan melalui manajemen produksi tiga tahap yang sistematis, meliputi pra-produksi (disposisi dan persiapan alat), produksi (pelaksanaan liputan dengan variasi teknik wide shot, medium shot, dan close-up), serta pasca-produksi (penyuntingan dan penyusunan narasi). Pemanfaatan media sosial resmi dan saluran media baru berupa podcast kebudayaan oleh tim Media Digital telah berjalan efektif dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan menyebarluaskan program pelestarian budaya lokal secara interaktif kepada masyarakat luas, sekaligus memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Saran

Dinas Kebudayaan Kota Palembang disarankan untuk menyusun Standard Operating Procedure (SOP) tertulis yang terperinci mengenai alur manajemen dokumentasi dan menerapkan sistem penjadwalan konten (content scheduling) otomatis untuk menjaga konsistensi publikasi di masa libur panjang. Universitas Bina Darma disarankan untuk meningkatkan pembekalan kehumasan praktis berbasis digital bagi mahasiswa sebelum terjun ke instansi mitra. Bagi mahasiswa magang berikutnya, diharapkan dapat melatih keterampilan teknis operasional media dan memahami pola komunikasi protokoler pemerintahan terlebih dahulu agar proses adaptasi berjalan lebih efisien.

DAFTAR REFERENSI

- Ayumsari, R. (2022). Peran dokumentasi informasi terhadap keberlangsungan kegiatan organisasi mahasiswa. *Tibannbaru: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 6(1), 45-58.
- Bowen, S. A. (2017). Ethics in Government Public Relations. In *The Handbook of Public Relations* (pp. 157–178). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315085524-11>
- Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2006). *Effective Public Relations* (9th ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Derivanti, A. D. (2022). The Role of Government Digital Public Relations in Providing Innovative Information to the Public. *COMMENTATE: Journal of Communication Management*, 3(2), 165-178. <https://doi.org/10.37535/103003220227>
- Hidayati, T. (2014). *Peran Humas Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik (Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI)* (Doctoral dissertation). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Husna, A., & Affandi, I. (2018). Government's Efforts in Developing Civic Culture: The Malays Palembang Provided Through Palembang Emas 2018 Programs. *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)*. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.101>
- Hutagalung, I. (2015). Media and Cultural Heritage. *Jurnal Sampurasun*, 1(1), 12-20. <https://doi.org/10.23969/sampurasun.v1i1.21>
- Iqbal, K. (2021). *Analisis Website Dinas Pariwisata Kota Palembang Menggunakan Metode System Usability Scale*. (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Bina Darma, Palembang.

- Lee, H. (2015). Reflects of the Local Characteristics in the Cultural Contents. *Indian Journal of Science and Technology*, 8(25), 1–5. <https://doi.org/10.17485/IJST/2015/V8I25/80756>
- Mauad, A. M. (2018). Imagens em fuga: considerações sobre espaço público visual no tempo presente. *Revista Tempo e Argumento*, 10(23), 252-285.
- Molina, L. G., & dos Santos, J. C. (2018). Curadoria Digital: novos suportes documentais e a preservação da memória. *Prisma.com*, (38), 82-101.
- Nugraha, A. R., Novianti, E., Erdinaya, L. K., Komariah, K., & Priyatna, C. C. (2019). Implementation of public communication management in pangandaran regency government. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(9), 925-930.
- Nur, J., & Mutia, T. (2022). Model manajemen produksi video dokumentasi kegiatan dprd provinsi riau. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 3(6), 306-315. <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v3i6.15720>
- Poddubna, L. P. (2019). The use of document and information tools in the formation of a modern management system of the organization. *Knowledge, Innovation, Business, Information, Technology (KIBIT)*, 42(3), 69–75. <https://doi.org/10.37203/KIBIT.2019.42.11>
- Ruslan, R. (2014). *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Salvador-Benítez, A., & Sánchez-Vigil, J. M. (2016). La fotografía como documento informativo en las webs de los ministerios españoles. Acceso, visibilidad, funcionalidad y políticas de uso. *Revista Española de Documentación Científica*, 39(2), e134.
- Varghese Jr, T. K. (2017). How does information spread on social media lead to effective change? *Clinics in Colon and Rectal Surgery*, 30(04), 240-243.
- Volkov, A., Chulkov, V. O., Chulkov, G. O., Kazaryan, R. R., & Kyzina, O. (2015). Qualities of documentation management chain (part 3). *Advanced Materials Research*, 1065, 2409-2412.